Copyright © 2026 The Author(s)
Didaktika: Jurnal Kependidikan Vol. 15 No. 2 Mei 2026

Kesiapan Komponen Standar Nasional Pendidikan dalam Pelaksanaan Sekolah Rakyat: Komparasi Kasus Pada Wilayah Malang Raya

Lestari Eko Wahyudi[1], Marco Sigalingging[2], Dhefara Hersaning Djati[3]
[1,2,3] Universitas Brawijaya, Indonesia

[1]lestariekow@ub.ac.id
DOI: https://doi.org/10.58230/27454312.4050

Abstrak

Riset berikut bertujuan untuk menganalisis kesiapan pelaksanaan delapan komponen Standar Nasional Pendidikan (SNP) dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat di wilayah Malang Raya, yang meliputi Kota Malang, Kota Batu, serta Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus berbasis *grounded theory* dengan analisis metode perbandingan tetap (*constant comparative method*). Data diperoleh dari dokumen kebijakan, berita daring, dan publikasi ilmiah terkait pelaksanaan Sekolah Rakyat. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan Sekolah Rakyat di ketiga wilayah tersebut masih menghadapi sejumlah kendala dalam memenuhi komponen SNP. Kota Malang dan Kota Batu mengalami keterbatasan dalam hal staf pengajar dan wali murid, sementara Kabupaten Malang belum memiliki bangunan sekolah permanen dan masih bergantung pada fasilitas di daerah lain. Fasilitas pembelajaran yang terbatas, dukungan teknologi yang rendah, dan perbedaan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur telah memperlebar kesenjangan kesiapan antar daerah. Analisis tersebut mengonfirmasi bahwa keberhasilan implementasi Sekolah Rakyat tidak hanya bergantung pada koordinasi antar pemangku kepentingan, ketersediaan sumber daya manusia, dan pemerataan infrastruktur pendidikan, tetapi juga pada kemampuan pemerintah dalam memastikan integrasi kebijakan, konsistensi pelaksanaan, serta keberlanjutan dukungan lintas sektor secara sistematis di seluruh wilayah Malang Raya.

Kata kunci: Sekolah Rakyat, Standar Nasional Pendidikan, Malang Raya, Kesiapan Pendidikan, Kesetaraan Pendidikan.

Pendahuluan

Pendidikan berperan krusial dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia dan menentukan perkembangan suatu negara. Selain memberikan pengetahuan dan keterampilan, pendidikan juga membentuk karakter dan kemampuan adaptasi individu terhadap dinamika sosial. Ahmadi dan Uhbiyati (2007) dalam Hidayat et al. (2019) menyatakan bahwa pendidikan merupakan proses sadar dan terencana untuk mendorong perkembangan menuju kedewasaan, sementara Abdurrahman Saleh Abdullah (2007) dalam Hidayat et al. (2019) memandangnya sebagai proses sosial untuk mengarahkan generasi menuju kemajuan. Namun, dalam praktiknya, pendidikan masih menghadapi ketimpangan akses dan kualitas antarwilayah.

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembentukan kualitas manusia dan peradaban bangsa. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan membentuk individu yang utuh dan seimbang, selaras dengan kodrat alam serta mampu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya (Hidayat et al., 2019; Sugiarta et al., 2019). Sejalan dengan itu, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 3, menegaskan bahwa pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan, membentuk karakter, serta membangun peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan masyarakat (Komalasari & Saripudin, 2017). Pendidikan juga diarahkan untuk mengoptimalkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Pemerintah Republik Indonesia, 2003)..

Menyadari pentingnya pendidikan, Pemerintah Indonesia menetapkan porsi anggaran pendidikan 20% dari belanja negara serta daerah setiap tahun anggaran (Pemerintah Republik Indonesia, 2022; Wicaksono, 2021). Pemerintah turut menetapkan delapan Standar Nasional Pendidikan yang termasuk standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik serta tenaga kependidikan, standar sarana serta prasarana, standar pengelolaan, serta standar pembiayaan (Pemerintah Republik Indonesia, 2021; Safitri & Julaiha, 2026).

Namun demikian, kondisi empiris menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan realitas di lapangan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di Indonesia pada tahun 2024 baru mencapai 8,85 tahun, dan dalam periode 2020–2023 tidak pernah melampaui 9 tahun (8,48 tahun pada 2020; 8,54 tahun pada 2021; 8,69 tahun pada 2022; dan 8,77 tahun pada 2023) (Badan Pusat Statistik, 2023; 2024). Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap kondisi ini adalah tingginya biaya pendidikan yang memicu ketimpangan akses pendidikan (Kurniawati, 2022). Data menunjukkan adanya peningkatan signifikan biaya pendidikan di berbagai jenjang, mulai dari SD sebesar 90% hingga perguruan tinggi hingga 31,38% yang semakin memperkuat eksklusivitas pendidikan dan membatasi akses kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (Alfathi, 2025).

Merespons permasalahan tersebut, pemerintah menghadirkan inovasi kebijakan berupa Sekolah Rakyat sebagai solusi untuk meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat miskin. Sekolah Rakyat merupakan unit pelaksana teknis di bawah Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial, yang bertujuan menyediakan layanan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin agar memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas (Widia, 2025; Rafsanjani et al., 2026). Kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan capaian akademik, tetapi juga pada pemerataan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Secara kelembagaan, Sekolah Rakyat telah diatur melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 7 Tahun 2025 (Rafsanjani et al., 2026), serta dikembangkan dalam tiga bentuk, yaitu Sekolah Rakyat Menengah Pertama, Sekolah Rakyat Menengah Atas, dan Sekolah Rakyat Terintegrasi (Menteri Sosial Republik Indonesia, 2025). Inisiatif ini juga mengusung pendekatan kolaboratif lintas sektor serta mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan metode partisipatif dalam proses pembelajaran (Maryono et al., 2025; Rizqillah & Ulum, 2025).

Meskipun demikian, implementasi kebijakan Sekolah Rakyat di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Di wilayah Malang Raya, misalnya, terdapat disparitas rata-rata lama sekolah antara Kota Malang (11,14 tahun), Kota Batu (9,87 tahun), dan Kabupaten Malang (7,80 tahun) yang menunjukkan masih adanya ketimpangan akses pendidikan (Badan Pusat Statistik, 2024). Selain itu, berbagai permasalahan implementatif juga ditemukan, seperti kekurangan tenaga pengajar, keterbatasan sarana prasarana seperti laptop dan fasilitas

Copyright © 2026 The Author(s)

pendukung (Lanang, 2025). Selain itu, kekurangan tenaga pendamping seperti wali asuh dan wali asrama di Kota Malang dan Kota Batu juga terjadi (Pratama, 2025; Indo, 2025; Ayu, 2025). Di Kabupaten Malang, bahkan terdapat kendala mendasar berupa belum tersedianya bangunan sekolah permanen, sehingga peserta didik masih harus menumpang di daerah lain (Mahmudan, 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasi di tingkat lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat celah penelitian yang signifikan. Meskipun berbagai studi telah membahas Sekolah Rakyat sebagai inovasi kebijakan pendidikan berbasis kesejahteraan sosial, masih terbatas kajian yang secara komprehensif menganalisis bagaimana implementasi kebijakan ini berjalan di tingkat lokal, khususnya dalam konteks kapasitas kelembagaan, ketersediaan sumber daya, dan koordinasi antar aktor. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji Sekolah Rakyat menggunakan perspektif tata kelola adaptif untuk memahami bagaimana kebijakan ini merespons dinamika dan kompleksitas permasalahan pendidikan di daerah. Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan bahwa dari sisi kesiapan penerapan delapan komponen SNP, khususnya pada aspek tenaga kependidikan, sarana prasarana, dan pengelolaan implementasi Sekolah Rakyat di Malang Raya masih jauh dari ideal dan membutuhkan banyak sekali pengembangan di masa yang akan datang dan belum banyak dikaji. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan berikut: **(**1) sejauh mana kesiapan komponen Standar Nasional Pendidikan dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat di wilayah Malang Raya? (2) kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan standar tersebut di masing-masing daerah?

Metode

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif studi kasus dengan memanfaatkan kajian dokumentasi digital serta wawancara semi-terstruktur sebagai teknik pengumpulan data. Studi dokumentasi merupakan teknik penelusuran data historis yang kini semakin diakui sebagai metode penting dalam kajian ilmu sosial (Nilamsari, 2014). Wawancara semi-terstruktur digunakan sebagai pelengkap studi dokumentasi berdasarkan pedoman wawancara (*interview guide*) yang dikembangkan dari kajian literatur dan dokumen kebijakan yang telah dikumpulkan sebelumnya. Pendekatan ini dipilih karena wawancara terstruktur efektif dalam menghasilkan informasi yang terarah dan akurat (Fiantika et al., 2022).

Informan dalam penelitian ini berjumlah satu orang, yaitu Anggota Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Jawa Timur sekaligus Penanggungjawab Sekolah Rakyat dari unsur Dinas Sosial Jawa Timur, dipilih secara purposif karena keterlibatan langsungnya dalam pelaksanaan program. Sumber data terdiri atas data primer hasil wawancara dan data sekunder berupa dokumen digital mencakup berita daring, jurnal ilmiah, serta dokumen kebijakan terkait Sekolah Rakyat dan SNP di wilayah Malang Raya. Untuk menjamin kredibilitas data, diterapkan teknik triangulasi sumber, di mana data wawancara digunakan untuk mengonfirmasi dan memvalidasi temuan studi pustaka. Kredibilitas dokumen sekunder juga dijaga melalui seleksi berdasarkan relevansi topik, kredibilitas sumber, dan tahun publikasi (Sugiyono dalam Nilamsari, 2014).

Analisis data dilaksanakan menggunakan metode perbandingan tetap (*Constant Comparative Method*). Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Glaser dan Strauss (1967) sebagai inti analisis dalam pendekatan *grounded theory*, di mana peneliti secara berkesinambungan membandingkan setiap unit data dengan data lain untuk menemukan pola dan membangun kategori analitis (Kolb, 2012). Moleong (2022) menjelaskan bahwa dalam proses analisisnya, peneliti terus-menerus membandingkan satu data dengan data lainnya

serta satu kategori dengan kategori yang lain, sehingga menghasilkan pemahaman yang mendalam dan koheren. Metode ini tidak bersifat linier, melainkan siklikal dan iteratif, di mana pengumpulan dan analisis data berlangsung secara simultan dan saling memperkuat (Charmaz & Thornberg, 2021). Penerapan CCM dalam penelitian kualitatif terbukti mampu menghasilkan temuan yang kaya makna karena mengutamakan keterbukaan terhadap data dan fleksibilitas dalam pembentukan kategori (Assyakurrohim et al., 2022). Metode ini diterapkan melalui empat tahapan:

1. Kondensasi data: peneliti mengidentifikasi unit-unit data bermakna dan memberikan kode (coding) pada setiap unit.
2. Kategorisasi data: kode-kode yang dihasilkan dikelompokkan berdasarkan kesamaan makna dan diberi label yang mewakili isi kategorinya.
3. Sintesisasi: peneliti menelusuri hubungan antarkategori untuk menemukan pola dan kecenderungan, lalu memberi label konseptual pada hubungan tersebut.
4. Penyusunan hipotesis kerja: merumuskan proposisi sementara sebagai dasar pemahaman konseptual atas temuan penelitian (Moleong, 2022; Saleh, 2023).

Hasil

Tahapan Pertama: Kondesasi Data Berdasarkan Sumber Daring dan Wawancara

Tahap pertama dalam analisis data adalah kondensasi data. Pada tahap ini, informasi yang berhasil dikumpulkan dari sumber-sumber daring dan wawancara diidentifikasi berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian, kemudian diberikan kode awal. Hasil kondensasi data disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Tahap Kondensasi Data

Sumber Dokumen	Kutipan Relevan	Kode Awal	Wilayah
Berita Nasional (Pratama, 2025)	"Sekolah Rakyat di Kota Malang menghadapi kekurangan tenaga pengajar di tingkat SRMP dan SRMA."	Kekurangan guru; keterbatasan pendidik	Kota Malang
Berita Nasional (Indo, 2025)	"Sekolah Rakyat Malang terkendala pada keterbatasan sarana seperti perangkat laptop dan fasilitas pelindung asrama."	Keterbatasan sarana belajar; minim fasilitas asrama	Kota Malang
Berita Nasional (Ayu, 2025)	"Sekolah Rakyat di Kota Batu mengalami keterbatasan sumber daya manusia pada posisi wali asuh dan wali asrama."	Kekurangan wali asuh; kekurangan tenaga pendamping	Kota Batu
Berita Nasional (Lanang, 2025)	"Belum terpenuhinya kebutuhan perangkat teknologi pembelajaran di Sekolah Rakyat Batu."	Keterbatasan perangkat teknologi; keterlambatan pemenuhan alat belajar digital	Kota Batu
Berita Nasional (Mahmudan, 2025)	"Di Kabupaten Malang, kegiatan belajar masih menumpang di fasilitas Sekolah Rakyat di dua wilayah lainnya karena belum ada bangunan permanen."	Tidak ada gedung permanen; menumpang di wilayah lain	Kabupaten Malang
Hasil Wawancara	"Gubernur langsung mengundang Bupati/Wali Kota se-Jawa Timur... sangat mendukung program Sekolah Rakyat."	Dukungan pemerintah daerah; koordinasi lintas level pemerintahan	Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang
Hasil Wawancara	"Sudah ada SK Tim Satgas Sekolah Rakyat Provinsi, turunan dari Satgas Kementerian Sosial."	Pembentukan struktur koordinatif; peran Satgas	Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang

Copyright © 2026 The Author(s)

Hasil Wawancara	"Sekolah Rakyat harus punya kelas dan asrama... modelnya seperti pondok."	Sistem pendidikan berasrama; kebutuhan fasilitas asrama	Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang
Hasil Wawancara	"Beberapa fasilitas menggunakan aset provinsi seperti BLK Singosari dan BPSDM Malang."	Pemanfaatan aset pemerintah daerah; penggunaan gedung eksisting	Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang
Hasil Wawancara	"Kendala terbesar adalah ketersediaan lahan minimal 5–10 hektare... Pemda yang menanggung pematangan lahan."	Kendala lahan; tanggung jawab Pemda	Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang
Hasil Wawancara	"Tantangannya menyiapkan siswa... banyak anak yang tidak mau karena sistemnya berasrama."	Resistensi masyarakat; adaptasi model pendidikan	Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang
Hasil Wawancara	"Kurikulum Sekolah Rakyat gabungan antara formal dan informal."	Penggabungan kurikulum; pendidikan karakter	Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang
Hasil Wawancara	"Tenaga pendidik berasal dari pusat, sebagian rekrutmen melalui Pemda dan Kemensos."	Distribusi guru; rekrutmen lintas lembaga	Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang
Hasil Wawancara	"Monitoring dilakukan bersama antara Kemensos, provinsi, dan kabupaten."	Pengawasan multi-level; sistem evaluasi bersama	Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang
Hasil Wawancara	"Tidak ada daerah yang menolak Sekolah Rakyat, hanya berbeda kemampuan dalam penyediaan lahan."	Variasi kesiapan daerah; komitmen pemerintah lokal	Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang

Kode – kode awal tersebut merupakan titik awal dalam mencari inti dari kesiapan SNP pada Sekolah Rakyat di Malang Raya yang akan dilanjutkan pada analisis tahap berikutnya

Tahapan Kedua: Kategorisasi Data Berdasarkan Kode Awal

Setelah menyelesaikan tahap kondensasi, dilanjutkan dengan tahap kategorisasi data. Tahap ini mengelompokkan kode-kode awal ke dalam kategori berdasarkan kesamaan makna dan dikaitkan dengan komponen SNP yang relevan. Hasil kategorisasi disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Tahap Kategorisasi Data

Kode Awal	Kategori	Label Komponen SNP	Definisi Operasional Kategori	Wilayah
Kekurangan guru; keterbatasan pendidik; kekurangan wali asuh; kekurangan tenaga pendamping	Keterbatasan tenaga pendidik dan kependidikan	Standar tenaga kependidikan	Mencakup kendala terkait jumlah, kompetensi, dan distribusi tenaga pendidik serta tenaga pendukung seperti wali asuh dan pengelola asrama.	Kota Malang dan Kota Batu
Keterbatasan sarana belajar; minim fasilitas asrama	Keterbatasan sarana dan infrastruktur pembelajaran	Standar sarana dan prasarana	Meliputi keterbatasan fasilitas fisik dan infrastruktur pendidikan, termasuk gedung, asrama, serta sarana pendukung pembelajaran.	Kota Malang dan Kabupaten Malang
Keterbatasan perangkat	Rendahnya	Standar sarana	Berkaitan dengan	Kota Malang

teknologi; keterlambatan pemenuhan alat belajar digital	Dukungan Teknologi Pembelajaran	dan prasarana	keterbatasan perangkat digital dan sarana teknologi yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran di Sekolah Rakyat.	dan Kota Batu
Tidak ada gedung permanen; menumpang di wilayah lain	Ketergantungan lintas wilayah	Standar sarana dan prasarana	Kondisi di mana suatu wilayah belum mandiri dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat dan masih bergantung pada wilayah lain.	Kabupaten Malang
Dukungan pemerintah daerah; koordinasi lintas level; peran Satgas	Koordinasi dan Dukungan Antar Pemangku Kepentingan	Standar Pengelolaan	Menggambarkan bentuk kolaborasi dan sinergi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat.	Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang
Pemanfaatan aset pemerintah; kendala lahan; tanggung jawab Pemda	Kesiapan Infrastruktur dan Aset Pendidikan	Standar Sarana dan Prasarana	Mencakup penyediaan gedung, asrama, dan lahan untuk pelaksanaan kegiatan belajar dan tinggal siswa.	Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang
Penggabungan kurikulum formal-informal; pendidikan karakter	Integrasi Kurikulum Formal dan Nonformal	Standar isi dan standar kurikulum	Menunjukkan pendekatan pembelajaran yang menggabungkan aspek akademik dan pembentukan karakter sesuai misi sosial Sekolah Rakyat.	Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang
Distribusi guru; rekrutmen lintas lembaga	Ketersediaan dan Penugasan Tenaga Pendidik	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Melibatkan mekanisme penempatan guru oleh pusat dan dukungan tenaga lokal dari Pemda.	Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang
Resistensi masyarakat; adaptasi model berasrama	Tantangan Sosial dan Penerimaan Masyarakat	Standar Proses	Menunjukkan hambatan sosial dalam penerimaan model sekolah berasrama bagi anak dari keluarga miskin.	Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang
Pengawasan multi-level; evaluasi bersama	Sistem Monitoring dan Evaluasi Terpadu	Standar Penilaian dan Pengelolaan	Melibatkan mekanisme pengawasan bersama antar instansi untuk memastikan keberlanjutan program.	Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang
Variasi kesiapan daerah; komitmen pemerintah lokal	Ketimpangan Kesiapan Wilayah	Standar Pengelolaan	Menggambarkan perbedaan kemampuan antarwilayah dalam penyediaan sumber daya, fasilitas, dan dukungan kebijakan.	Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang

Tahapan Ketiga: Sintesis/Interpretasi Data Oleh Peneliti

Peneliti mulai untuk menelusuri dan mencari hubungan antar kategori untuk menemukan pola, keterkaitan, atau kecenderungan tertentu untuk menghasilkan sebuah pemahaman atau temuan awal terkait dengan kesiapan SNP di Malang Raya yang kemudian hasilnya disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Tahap Sintesisasi Data

Kategori	Hasil Sintesis / Hubungan Antar Kategori	Pola Perbandingan Antarwilayah	Interpretasi Awal
Keterbatasan tenaga	Kekurangan guru di Malang	Kota Batu dan Malang	Kedua wilayah mengalami

Copyright © 2026 The Author(s)

pendidik dan kependidikan	dan wali asuh di Batu menunjukkan pola yang sama: keterbatasan SDM inti dalam penyelenggaraan pembelajaran dan pendampingan siswa.	sama-sama menghadapi kekurangan tenaga, tetapi Batu lebih banyak kekurangan tenaga asuh, sedangkan Malang kekurangan guru pengajar formal.	keterbatasan sumber daya manusia yang berdampak pada efektivitas proses pembelajaran Sekolah Rakyat.
Keterbatasan sarana dan infrastruktur pembelajaran	Baik Kota Malang maupun Kabupaten Malang menghadapi keterbatasan sarana fisik. Kabupaten Malang bahkan belum memiliki gedung permanen.	Kota Malang memiliki sarana terbatas (asrama dan laptop), sedangkan Kabupaten Malang belum memiliki fasilitas fisik sama sekali.	Tingkat kesiapan sarana fisik di Kabupaten Malang lebih rendah dibandingkan Kota Malang dan Kota Batu.
Rendahnya Dukungan Teknologi Pembelajaran	Keterbatasan perangkat teknologi muncul di dua wilayah: Malang (kekurangan laptop) dan Batu (belum terpenuhinya kebutuhan perangkat pembelajaran digital).	Pola serupa muncul di dua wilayah, menunjukkan belum adanya sistem pembelajaran berbasis teknologi di kedua wilayah tersebut.	Aspek digitalisasi pembelajaran masih lemah di Sekolah Rakyat, menunjukkan rendahnya kesiapan komponen teknologi.
Ketergantungan lintas wilayah	Kabupaten Malang bergantung pada fasilitas dari Kota Malang dan Kota Batu, menunjukkan ketimpangan antarwilayah.	Hanya Kabupaten Malang yang bergantung pada wilayah lain; Kota Malang dan Batu relatif mandiri.	Pola ini menegaskan adanya kesenjangan kesiapan antarwilayah dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat.
Koordinasi dan Dukungan Antar Pemangku Kepentingan dan Kesiapan Infrastruktur	Dukungan pemerintah daerah mempercepat penyediaan sarana, namun perbedaan kapasitas Pemda memunculkan kesenjangan antarwilayah.	Kota Malang dan Batu lebih siap secara aset dibanding Kabupaten Malang.	Koordinasi antarinstansi mempengaruhi percepatan realisasi Sekolah Rakyat.
Integrasi Kurikulum dan Ketersediaan Pendidik	Implementasi kurikulum ganda memerlukan guru yang kompeten di bidang akademik dan sosial.	Kota Batu dan Kota Malang menghadapi keterbatasan tenaga asuh dan tenaga pendidik.	Keterbatasan SDM berpengaruh terhadap efektivitas kurikulum ganda.
Tantangan Sosial dan Ketimpangan Wilayah	Penerimaan masyarakat yang rendah muncul lebih kuat di wilayah dengan fasilitas terbatas.	Semua wilayah cenderung tidak menghadapi resistensi yang signifikan.	Ketimpangan fasilitas memperkuat tantangan sosial pelaksanaan program.
Monitoring dan Evaluasi Terpadu dan Pengelolaan	Pengawasan bersama menjadi kunci keberlanjutan dan transparansi program lintas level.	Seluruh wilayah menerapkan mekanisme monitoring multi-level dengan variasi efektivitas.	Sistem evaluasi terpadu memperkuat akuntabilitas implementasi Sekolah Rakyat.

Tahapan Keempat: Penyusunan Hipotesis Kerja Sebagai Dasar Temuan

Pada tahap ini dirumuskan proposisi sementara yang menjadi dasar untuk menarik pemahaman konseptual mengenai temuan penelitian. Hasil penyusunan hipotesis kerja disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Penyusunan Hipotesis Kerja

Pernyataan atau Proposisi Sementara	Dasar Temuan / Kategori Pendukung	Wilayah yang Terkait
Keterbatasan tenaga pendidik dan wali asuh menyebabkan rendahnya efektivitas pelaksanaan pembelajaran di Sekolah Rakyat.	Keterbatasan Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Kota Malang, Kota Batu

Ketidaksiapan sarana fisik di Kota Malang dan di Kabupaten Malang menjadi faktor utama rendahnya kemandirian pelaksanaan Sekolah Rakyat.	Keterbatasan Sarana dan Infrastruktur Pembelajaran; Ketergantungan Lintas Wilayah	Kota Malang, Kabupaten Malang
Rendahnya dukungan perangkat teknologi pembelajaran berdampak pada belum optimalnya penerapan proses pembelajaran digital di Sekolah Rakyat.	Rendahnya dukungan teknologi dan pembelajaran	Kota Malang dan Kota Batu
Ketergantungan Kabupaten Malang terhadap fasilitas Sekolah Rakyat di wilayah lain menunjukkan belum meratanya kesiapan implementasi komponen SNP di Malang Raya.	Ketergantungan lintas wilayah	Kabupaten Malang
Keberhasilan pelaksanaan Sekolah Rakyat bergantung pada kekuatan koordinasi antar pemangku kepentingan dan dukungan pemerintah daerah.	Koordinasi dan Dukungan Antar Pemangku Kepentingan	Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang
Ketimpangan kesiapan infrastruktur antarwilayah menjadi hambatan utama dalam pemerataan pelaksanaan Sekolah Rakyat.	Kesiapan Infrastruktur dan Aset Pendidikan; Ketimpangan Kesiapan Wilayah	Kota Malang, Kabupaten Malang
Implementasi kurikulum ganda membutuhkan peningkatan kapasitas tenaga pendidik agar efektif dijalankan di semua wilayah.	Integrasi Kurikulum; Ketersediaan Tenaga Pendidik	Kota Malang, Kota Batu
Resistensi masyarakat terhadap model pendidikan berasrama muncul akibat kurangnya pemahaman terhadap tujuan sosial program.	Tantangan Sosial dan Penerimaan Masyarakat	Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang
Sistem monitoring dan evaluasi terpadu dapat memperkuat transparansi dan keberlanjutan Sekolah Rakyat lintas wilayah.	Monitoring dan Evaluasi Terpadu	Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang

Pembahasan

Intepretasi Hasil Kesiapan Komponen SNP Dalam Pelaksanaan Sekolah Rakyat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kesiapan komponen Standar Nasional Pendidikan (SNP) dalam implementasi Sekolah Rakyat di Malang Raya tidak hanya mencerminkan keterbatasan teknis, tetapi mengindikasikan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan kapasitas implementasi lokal (*implementation gap*). Kebijakan Sekolah Rakyat dirancang dengan asumsi bahwa seluruh komponen SNP dapat dipenuhi secara simultan, namun pada praktiknya, kapasitas daerah menunjukkan variasi yang signifikan. Secara analitis, terdapat tiga komponen krusial yang belum terpenuhi secara optimal, yaitu tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, serta pengelolaan kelembagaan. Keterbatasan tenaga pendidik dan wali asuh menunjukkan adanya *mismatch* antara kebutuhan model pendidikan berasrama dengan sistem penyediaan SDM yang masih bersifat sektoral. Sementara itu, keterbatasan sarana dan prasarana, terutama di Kabupaten Malang yang belum memiliki fasilitas permanen. Hal ini menunjukkan lemahnya kapasitas infrastruktur dasar dalam mendukung implementasi kebijakan.

Lebih lanjut, perbedaan tingkat kesiapan antarwilayah (Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang) merefleksikan ketimpangan kapasitas fiskal dan kelembagaan daerah (*local governance capacity).* Kabupaten Malang menunjukkan ketergantungan terhadap wilayah lain (*spatial dependency*), sedangkan Kota Malang dan Kota Batu relatif lebih siap meskipun masih

Copyright © 2026 The Author(s)

menghadapi keterbatasan. Hal ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari konteks kapasitas daerah. Di sisi lain, keberadaan koordinasi lintas level pemerintahan dan sistem monitoring bersama menjadi faktor pendukung penting. Namun, mekanisme ini masih bersifat administratif dan belum berkembang menjadi tata kelola adaptif yang mampu merespons dinamika lokal secara fleksibel. Dengan demikian, kesiapan SNP dalam Sekolah Rakyat tidak hanya bergantung pada pemenuhan standar formal, tetapi pada kemampuan sistem dalam mengelola kompleksitas implementasi di tingkat daerah.

Perbandingan Komponen SNP Dalam Penelitian Lain

Temuan penelitian ini sejalan dengan studi sebelumnya yang menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam implementasi Sekolah Rakyat. Maryono et al. (2025) menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada koordinasi antara kementerian dan pemerintah daerah, khususnya dalam pemenuhan tenaga pendidik dan infrastruktur. Hal ini konsisten dengan temuan penelitian ini yang menempatkan koordinasi sebagai faktor kunci, meskipun belum sepenuhnya efektif. Selain itu, Rizqillah dan Ulum (2025) menyoroti bahwa Sekolah Rakyat sebagai kebijakan inklusif memerlukan integrasi antara nilai lokal dan sistem pendidikan formal. Penelitian ini memperkuat argumen tersebut dengan menunjukkan bahwa implementasi kurikulum ganda membutuhkan kapasitas SDM yang belum sepenuhnya tersedia di daerah. Dengan demikian, persoalan bukan hanya pada desain kurikulum, tetapi pada kesiapan aktor pelaksana.

Lebih luas, temuan ini juga mengonfirmasi kajian Kurniawati (2022) terkait ketimpangan kualitas pendidikan akibat distribusi sumber daya yang tidak merata. Kondisi Kabupaten Malang yang belum memiliki fasilitas permanen menjadi bukti empiris bahwa ketimpangan struktural antarwilayah masih menjadi isu utama dalam sistem pendidikan Indonesia. Namun, berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung deskriptif, studi ini menawarkan pendekatan yang lebih analitis dengan menempatkan ketimpangan tersebut dalam kerangka kapasitas tata kelola daerah.

Implikasi, Limitasi, dan Penelitian Selanjutnya

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi berupa penguatan perspektif bahwa pemenuhan Standar Nasional Pendidikan tidak dapat dipahami semata sebagai proses administratif, melainkan sebagai fungsi dari kapasitas tata kelola adaptif daerah. Dengan demikian, kebijakan pendidikan seperti Sekolah Rakyat perlu direorientasi dari pendekatan *compliance-based* menuju *capacity-based approach*, yang mempertimbangkan variasi kemampuan daerah dalam implementasi.

Secara praktis, implikasi utama penelitian ini adalah perlunya: (1) penguatan kapasitas tenaga pendidik yang sesuai dengan model pendidikan berasrama, (2) percepatan penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata, dan (3) pengembangan mekanisme koordinasi yang lebih adaptif dan kontekstual. Tanpa intervensi pada aspek-aspek tersebut, program Sekolah Rakyat berpotensi memperlebar kesenjangan antarwilayah.

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama pada penggunaan data sekunder sebagai sumber utama dan jumlah informan yang masih terbatas. Kondisi ini berimplikasi pada belum tergalinya secara mendalam dinamika implementasi di tingkat mikro, seperti pengalaman siswa, guru, dan pengelola program. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan dengan melibatkan lebih banyak informan dari berbagai aktor, serta menggunakan pendekatan *mixed methods* atau studi lapangan yang lebih mendalam. Selain itu, penting untuk mengembangkan kajian komparatif lintas daerah guna menguji lebih lanjut bagaimana variasi kapasitas tata kelola mempengaruhi keberhasilan implementasi Sekolah Rakyat di konteks yang berbeda.

Kesimpulan

Sejalan dengan temuan sebelumnya, penelitian ini menegaskan bahwa pemenuhan delapan Standar Nasional Pendidikan dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat di Malang Raya masih belum optimal, khususnya pada aspek tenaga kependidikan, sarana-prasarana, dan pengelolaan. Ketimpangan antara Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang menunjukkan bahwa masalah utama tidak hanya pada keterbatasan sumber daya, tetapi pada perbedaan kapasitas implementasi antarwilayah. Kebaruan penelitian ini terletak pada penekanan bahwa kesenjangan tersebut merefleksikan ketidaksesuaian antara standar kebijakan yang seragam dengan kapasitas tata kelola daerah yang beragam. Dengan demikian, pemenuhan SNP tidak cukup dipahami sebagai kepatuhan administratif, melainkan sebagai fungsi dari kapasitas tata kelola adaptif. Berdasarkan hal tersebut, direkomendasikan: (1) penyesuaian implementasi SNP berbasis kapasitas daerah, terutama pada wilayah dengan kesiapan rendah seperti Kabupaten Malang; (2) penguatan distribusi dan kompetensi tenaga pendidik yang sesuai dengan model berasrama; serta (3) percepatan penyediaan infrastruktur minimum untuk mengurangi ketergantungan antarwilayah. Tanpa intervensi yang lebih kontekstual, Sekolah Rakyat berpotensi memperkuat ketimpangan yang justru ingin diatasi.

References

Alfathi, B. R. (2025). *Seberapa Besar Kenaikan Biaya Pendidikan Indonesia 6 Tahun Terakhir?* Goodstaats. https://goodstats.id/article/seberapa-besar-kenaikan-biaya-pendidikan-indonesia-selama-6-tahun-terakhir-Nn36z

Assyakurrohim, D., Ikhram, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, *3*(01), 1–9. https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951

Ayu, D. (2025). *Sekolah Rakyat Kota Batu Kekurangan Wali Asrama Dan Wali Asuh, Begini Respon Mensos Gus Ipul*. Surya Malang. https://suryamalang.tribunnews.com/batu/273600/sekolah-rakyat-kota-batu-kekurangan-wali-asrama-dan-wali-asuh-begini-respon-mensos-gus-ipul

Badan Pusat Statistik. (2023). *Rata-Rata Lama Sekolah*. Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDE1IzI=/-metode-baru-rata-rata-lama-sekolah.html

Badan Pusat Statistik. (2024). *Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) 2024*. Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDE1IzI=/-metode-baru-rata-rata-lama-sekolah.html

Charmaz, K., & Thornberg, R. (2020). The pursuit of quality in grounded theory. *Qualitative Research in Psychology*, *18*(3), 305–327. https://doi.org/10.1080/14780887.2020.1780357

Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Jonata, Mouw, E., Hasanah, N., Mashudi, I., Maharani, A., Nuryami, Ambarwati, K., Noflidaputri, R., & Waris, L. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Y. Novita (Ed.), *Rake Sarasin* (Issue March). PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.

Hidayat, R.. (2019). *Buku Ilmu Pendidikan Konsep, Teori, dan Aplikasinya* (C. Wijaya & Amiruddin (eds.)). Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI).

Holqi, D. S., Putra, F. A., & Annas, N. (2022). Pendidikan di persimpangan: Membangun akses dan kualitas di tengah ketimpangan sosial di Indonesia. *Technoscience, 13*(2), 87–97. https://doi.org/10.33751/ts.v13i2.2629

Copyright © 2026 The Author(s)

Indo, B. (2025). *Ketua DPRD Kota Malang Soroti Kendala Sarana Prasarana di Sekolah Rakyat*. Surya Malang. https://suryamalang.tribunnews.com/malang-raya/274905/ketua-dprd-kota-malang-soroti-kendala-sarana-prasarana-di-sekolah-rakyat

Kolb, S. M. (2012). Grounded theory and the constant comparative method: valid research strategies for educators. *Journal of Emerging Trends in Educational Research and Policy Studies*, *3*(1), 83–86. https://journals.co.za/content/sl_jeteraps/3/1/EJC135409

Komalasari, K., & Saripudin, D. (2017). Pendidikan karakter: Konsep dan implementasinya dalam sistem pendidikan nasional. *Cakrawala Pendidikan, 36*(3), 311–320. https://doi.org/10.21831/cp.v36i3.12345

Kurniawati, F. N. A. (2022). Meninjau Permasalahan Rendahnya Kualitas Pendidikan Di Indonesia Dan Solusi. *Academy of Education Journal*, *13*(1), 1–13. https://doi.org/10.47200/aoej.v13i1.765

Lanang, P. (2025). *Penyaluran Laptop untuk Sekolah Rakyat Kota Batu Molor Lagi*. Malang Times. https://malangtimes.com/baca/347509/20251013/012800/penyaluran-laptop-untuk-sekolah-rakyat-kota-batu-molor-lagi

Mahmudan. (2025). *Gedung Belum Siap, 96 Siswa Sekolah Rakyat Kabupaten Malang Menumpang Belajar di Kota Malang dan Batu*. Radar Malang. https://radarmalang.jawapos.com/pendidikan/816365814/gedung-belum-siap-96-siswa-sekolah-rakyat-kabupaten-malang-menumpang-belajar-di-kota-malang-dan-batu

Maryono, Syam, R. S. El, & Fuadi, S. I. (2025). Refleksi Hari Pendidikan Nasional 2025 : Sekolah Rakyat dan Kurikulum Deep Learning Bangsa Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) diperingati bangsa Indonesia setiapa tanggal 2 Mei sebagai momen refleksi untuk melihat sejauh mana. *Jurnal Pendidikan Dan Sastra Inggris*, *5*, 131–139. https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jupensi.v5i2.5173

Menteri Sosial Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat. *Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan*.

Muttaqin, T. (2018). Determinants of unequal access to and quality of education in Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning, 2*(1), 1–23. https://doi.org/10.36574/jpp.v2i1.27

Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana*, *13*(2), 177–181. http://fisip.untirta.ac.id/teguh/?p=16/

Pemerintah Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan. *Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan. *Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan*, *082465*, 1–16. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/196151/pp-no-4-tahun-2022

Pratama, R. K. (2025). *Sekolah Rakyat Kota Malang Masih Kekurangan Tenaga Pengajar*. Times Indonesia. https://timesindonesia.co.id/pendidikan/548732/sekolah-rakyat-kota-malang-masih-kekurangan-tenaga-pengajar

Rafsanjani, M. F., Mukti, S., Kosim, R. M., Hidayat, A., & Supiana. (2026). Analisis kebijakan penyelenggaraan sekolah rakyat dalam tata kerja dan penerimaan peserta didik baru.

Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 11(1). https://doi.org/10.23969/jp.v11i01.40667

Rizqillah, & Ulum, M. (2025). Sekolah Rakyat Sebagai Strategi Pendidikan Inklusif Untuk Pemberdayaan Sdm Marginal Di Indonesia: Analisis Program Era Presiden Prabowo. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, *13*(8), 1–8. https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365

Saleh, S. (2023). *Mengenal Peneltian Kualitatif Panduan Bagi Peneliti Pemula* (Vol. 17). Agma.

Safitri, Y., & Julaiha, S. (2026). Implementasi Standar Nasional Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di Sekolah. *Andragogi.*, *6*(1), 1–8. https://doi.org/10.31538/adrg.v6i1.2691

Suárez, M. N. O. (2025). Educational Inequality and Inclusion Strategies: An Analysis of School Access and Permanence. *Journal of Information Systems Engineering & Management*, *10*(33s), 678–684. https://doi.org/10.52783/jisem.v10i33s.5604

Sugiarta, I. M., Suryadi, A., & Suharno. (2019). Filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara dan relevansinya dalam pendidikan karakter di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 4*(2), 45–58. https://doi.org/10.24832/jpnk.v4i2.1234

Wicaksono, J. A. (2021). Kebijakan Pendidikan Nasional Perspektif Pembiayaan Pendidikan. *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial, 8*(2), 375–407. https://doi.org/10.36835/annuha.v8i2.459

Widia, J. (2025). Dilema Etis dalam Formulasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan: Pendekatan Normatif terhadap Prinsip Kesetaraan dan Pemberdayaan. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 4(*2), pp. 157–163. Available at: https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.472.